

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belanja daerah merupakan satu instrument strategis dalam sistem keuangan publik yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Melalui belanja daerah, pemerintah menyalurkan dana guna mendanai kegiatan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas belanja daerah menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah serta akuntabilitas pemerintah daerah (Andriani, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik (Anugeraheni & Yuniarta, 2022). Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah, karena kondisi keuangan yang baik akan mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan (Dyah & Poerwati, 2022). Dalam pengelolaan keuangan daerah, penerapan standar akuntansi menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin konsistensi, keandalan, dan objektivitas dalam pelaporan keuangan. Tanpa standar akuntansi yang memadai, informasi keuangan yang disajikan berpotensi kurang akurat, tidak dapat dibandingkan antar periode, serta menyulitkan proses pemeriksaan dan evaluasi oleh pihak auditor. Oleh karena itu, standar akuntansi digunakan sebagai pedoman bagi akuntan pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah (Kadek & Agus, 2024).

Sejak kebijakan otonomi daerah diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diperbaiki lagi di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai ruang gerak yang lebih leluasa untuk mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri. Seperti yang tertulis dalam Pasal 1 Ayat 5 UU

Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah berarti hak, wewenang, ditambah kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengelola sendiri hal-hal pemerintahan serta kepentingan rakyat di wilayahnya, tentu saja sesuai aturan hukum yang berlaku. Provinsi Bali menjadikan otonomi daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan public yang memiliki tujuan dan arah yang jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Putri & Yuniarta, 2023). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan APBD yang akuntabel dan transparan (Adi & Banu, 2024). Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan tersebut, diperlukan pengukuran kinerja keuangan yang dapat dilakukan melalui analisis laporan keuangan, khususnya dalam menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program pemerintah, sedangkan pengelolaan yang kurang optimal dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah (Prasetyo & Nugraheni, 2020).

Penerapan otonomi daerah dimaksudkan untuk mendorong kemandirian fiskal serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu membiayai kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Deliana, Sujadi, & Holiawati, 2023). Dalam konteks pengelolaan anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. APBD menjadi alat perencanaan keuangan tahunan yang mencerminkan kebijakan fiskal daerah dalam merespon kebutuhan dan prioritas pembangunan masyarakat. Sejalan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah yang mengurangi saldo anggaran dan tidak akan diterima kembali, sehingga penggunaannya harus diarahkan secara optimal untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, perencanaan dan realisasi belanja daerah sering kali

menghadapi tantangan berupa ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah. Ketidaksiuaian ini dapat menimbulkan kondisi surplus anggaran atau defisit anggaran, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu efektivitas kebijakan pembangunan daerah (Andriani, 2020). Oleh karena itu, diperlukan strategi pembiayaan dan pengelolaan anggaran yang adaptif dan responsif terhadap dinamika fiskal di daerah.

Dalam situasi terjadinya defisit, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan efisiensi anggaran melalui evaluasi program-program yang tidak prioritas atau yang dapat ditunda pelaksanaannya, tanpa mengorbankan layanan dasar masyarakat (Yustikasari & Pratiwi, 2021). Sebaliknya, jika terjadi surplus anggaran atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program pembangunan yang tertunda atau memperkuat anggaran pada tahun berjalan (Andriani, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10, sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), serta pembiayaan dari Pinjaman Daerah. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan belanja daerah yang berkelanjutan dan efisien.

Kabupaten Buleleng, sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Bali, memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangannya. Pandemi *COVID-19* yang melanda pada tahun 2020 memberikan dampak signifikan terhadap struktur APBD, prioritas belanja, serta proyeksi pendapatan daerah. Kondisi ini menuntut Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk melakukan penyesuaian kebijakan belanja agar tetap produktif dan efisien dalam rangka pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan anggaran berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karena itu, evaluasi terhadap realisasi belanja daerah perlu dilakukan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi sejauh

mana anggaran telah dimanfaatkan secara optimal dan berdampak pada capaian kinerja pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut merupakan gambaran nyata dari pelaksanaan anggaran belanja yang dapat dilihat melalui data realisasi anggaran belanja pada Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Buleleng

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2020	1.888.607.473.267,06	1.769.754.082.547,40
2021	2.218.243.390.026,02	2.070.375.555.969,86
2022	2.237.318.823.622,00	2.079.736.130.303,00
2023	2.309.280.216.986,00	2.205.123.101.991,13
2024	2.339.558.823.433,00	2.407.477.144.683,48

Sumber: Pemerintah Kabupaten Buleleng (2025)

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 1.1, kita dapat melihat bahwa anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Buleleng dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini seolah menandakan bahwa pemerintah daerah sedang berupaya keras untuk memperluas ruang gerak keuangan mereka dan lebih mantap dalam memenuhi proyek-proyek pembangunan daerah.

Mulai dari tahun 2020, anggaran belanja ditetapkan di angka Rp. 1.888.607.473.267,06, dan realisasinya mencapai Rp. 1.769.754.082.547,40. Lalu pada tahun 2021, anggarannya naik menjadi Rp2.218.243.390.026,02, dengan realisasi Rp2.070.375.555.969,86. Lonjakan ini kayaknya bagian dari strategi pemerintah daerah buat mendorong pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.

Pola naik ini tetap berjalan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, anggaran belanja Rp. 2.237.318.823.622,00 dan realisasinya Rp. 2.079.736.130.303,00. Kemudian, 2023 anggarannya bertambah lagi menjadi Rp. 2.309.280.216.986,00, sementara realisasinya Rp. 2.205.123.101.991,13. Hal ini menunjukkan betapa konsistennya pengelolaan keuangan di sana, khususnya dalam menjaga agar program-program utama pembangunan tetap berjalan tanpa henti.

Menariknya, di tahun 2024 realisasi belanja malah melebihi target anggaran

yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 2.339.558.823.433,00 sementara realisasinya mencapai Rp. 2.407.477.144.683,48. Situasi di sini bisa dilihat sebagai bukti bahwa pemerintah daerah mempunyai keluwesan dalam mengatur keuangan, mungkin melalui penyesuaian anggaran (seperti APBD-P) untuk menampung kebutuhan mendadak, misalnya tambahan kegiatan prioritas di pertengahan tahun.

Secara keseluruhan, tren kenaikan anggaran dan realisasi ini menggambarkan bahwa kinerja belanja daerah di Kabupaten Buleleng lagi dalam fase maju dan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pembangunan. Ini juga mencerminkan kemampuan mereka dalam mengurus dana keuangan dengan baik, ditambah peningkatan daya tahan fiskal dari waktu ke waktu.

Namun demikian, dari sisi analisis kinerja, peningkatan realisasi yang konsisten juga perlu ditinjau dari segi efisiensi dan efektivitas. Walaupun hasilnya positif, penting untuk menilai sejauh mana peningkatan belanja tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, gambaran nyata pada pembagian struktur belanja dapat dilihat melalui data Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal

Tahun	Realisasi Belanja Operasional	Realisasi Belanja Modal
2020	1.464.223.634.793,85	259.440.204.132,01
2021	1.625.692.312.146,49	202.523.213.564,37
2022	1.679.161.875.608,90	155.220.622.262,10
2023	1.752.101.099.431,13	189.949.646.989,00
2024	1.937.542.023.599,00	183.312.147.805,00

Sumber: Pemerintah Kabupaten Buleleng (2025)

Berdasarkan data tabel 1.2 diatas, terlihat bahwa komposisi belanja Pemerintah Kabupaten Buleleng selama periode 2020-2024 didominasi oleh belanja operasional,

sedangkan belanja modal menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun. Hal ini menggambarkan orientasi belanja daerah yang lebih besar diarahkan pada pembiayaan kegiatan rutin dan pelayanan public jangka pendek, dibandingkan dengan investasi asset atau pembangunan infrastruktur jangka panjang.

Pada tahun 2020, realisasi belanja operasional tercatat sebesar Rp. 1.464.223.634.793,85, sedangkan belanja modal sebesar Rp. 259.440.204.132,01. Komposisi ini menunjukkan bahwa sekitar 85% belanja daerah dialokasikan untuk kebutuhan operasional, seperti gaji pegawai, barang dan jasa, serta belanja hibah dan bantuan sosial. Kondisi tersebut umum terjadi dimasa pandemic covid-19, di mana pemerintah daerah lebih fokus pada pembiayaan kebutuhan dasar dan penanganan dampak social-ekonom masyarakat.

Pada tahun 2021, belanja operasional meningkat menjadi Rp. 1.625.692.312.146,49, namun belanja modal turun cukup signifikan menjadi Rp. 202.523.213.564,37. Penurunan ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran difokuskan pada pemulihan ekonomi dan penanganan pandemic, sehingga porsi belanja investasi fisik mengalami pengurangan.

Selanjutnya pada tahun 2022, belanja operasional kembali meningkat menjadi Rp. 1.679.161.875.608,90, sedangkan belanja modal kembali menurun menjadi Rp. 155.220.622.262,10. Penurunan belanja modal pada periode ini dapat diartikan bahwa prioritas pembangunan masih diarahkan pada sector pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan social, bukan pada pembangunan infrastruktur baru.

Memasuki tahun 2023, belanja operasional naik menjadi Rp. 1.752.101.099.431,13, sementara belanja modal meningkat tipis menjadi Rp. 189.949.646.989,00. Kenaikan ini menandakan adanya upaya pemerintah daerah untuk mulai menyeimbangkan kembali struktur belanja, terutama dengan menambah alokasi pada kegiatan investasi pembangunan setelah situasi ekonomi mulai pulih dari pandemic.

Pada tahun 2024, realisasi belanja operasional meningkat signifikan menjadi Rp. 1.937.542.023.599, sedangkan belanja modal sedikit menurun menjadi Rp. 183.312.147.805,00. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada belanja modal, peningkatan belanja operasional meunjukkan penguatan kapasitas pelayanan public dan pembiayaan paratur pemerintah daerah, yang bisa mendukung efektivitas kinerja pemerintah sehari-hari.

Namun disisi lain, rendahnya proporsi belanja modal menunjukkan bahwa investasi pembangunan jangka panjang masih terbatas.

Secara keseluruhan, pola belanja Pemerintah Kabupaten Buleleng selama lima tahun terakhir menunjukkan dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal. Kondisi ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan administratif, bukan pada pengadaan atau pembangunan aset baru yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.

Dari perspektif kinerja keuangan, tren ini dapat dikatakan positif dalam konteks stabilitas pelayanan publik, karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat secara konsisten. Namun, dari sisi efisiensi dan produktivitas belanja, tingginya proporsi belanja operasional dibandingkan modal dapat menjadi tantangan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pembangunan, ke depan pemerintah daerah perlu meningkatkan proporsi belanja modal agar penggunaan anggaran dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas, terutama dalam pembangunan infrastruktur publik dan investasi jangka panjang.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut merupakan gambaran nyata mengenai fenomena kinerja belanja pada rasio pertumbuhan, keserasian, dan efisiensi.

Tabel 1.3 Persentase Rasio Pertumbuhan, Keserasian, dan Efisiensi

Tahun	Pertumbuhan	Keserasian		Efisiensi
		Belanja Operasi	Belanja Modal	
2020	-22,91%	82,74%	14,66%	93,71%
2021	16,99%	78,52%	9,78%	93,33%
2022	0,45%	80,74%	7,46%	92,96%
2023	6,03%	79,46%	8,61%	95,49%
2024	9,18%	80%	7,6%	102,903%

Sumber: Diolah Peneliti(2025)

Berdasarkan data tabel 1.3 mengenai Persentase Rasio Pertumbuhan, Keserasian, dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024, dapat

diketahui bahwa kinerja belanja daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi namun cenderung membaik dari tahun ke tahun.

Dari sisi rasio pertumbuhan, terlihat bahwa pada tahun 2020 belanja daerah mengalami penurunan cukup signifikan sebesar -22,91%, yang menandakan adanya kontraksi belanja akibat dampak pandemi COVID-19. Pada masa tersebut, pemerintah daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk mendukung penanganan kesehatan dan pemulihan sosial ekonomi, sehingga banyak kegiatan pembangunan mengalami pengurangan. Namun, pada tahun 2021 pertumbuhan belanja daerah meningkat tajam menjadi 16,99%, yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan fiskal dan meningkatnya aktivitas pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2022 pertumbuhan hanya sebesar 0,45%, menandakan adanya perlambatan atau kebijakan pengendalian belanja yang lebih hati-hati. Memasuki tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan belanja kembali meningkat masing-masing sebesar 6,03% dan 9,18%, menandakan bahwa pemerintah daerah mulai menstabilkan kinerjanya dan meningkatkan kapasitas belanja secara bertahap untuk mendukung pembangunan daerah.

Dari aspek rasio keserasian, komposisi belanja daerah Kabupaten Buleleng selama periode 2020–2024 masih didominasi oleh belanja operasi, dengan proporsi berkisar antara 78% hingga 83% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih difokuskan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan seperti gaji pegawai, barang dan jasa, serta biaya operasional lainnya. Sementara itu, belanja modal yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, dan investasi daerah, justru menunjukkan proporsi yang relatif rendah dan cenderung menurun dari 14,66% pada tahun 2020 menjadi hanya 7,6% pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur belanja daerah belum seimbang, karena porsi belanja rutin masih jauh lebih besar dibandingkan belanja investasi. Idealnya, pemerintah daerah perlu berupaya untuk meningkatkan

porsi belanja modal agar dapat memberikan dampak pembangunan yang lebih nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, pemilihan Kabupaten Buleleng sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah ini memiliki wilayah administratif terbesar di Provinsi Bali dengan kompleksitas pengelolaan keuangan yang tinggi, sehingga representatif untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keseimbangan belanja daerah. Berdasarkan data tahun 2020–2024, Buleleng menunjukkan fluktuasi pertumbuhan belanja yang signifikan mengalami penurunan sebesar -22,91% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, kemudian meningkat hingga 9,18% pada tahun 2024, mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara adaptif terhadap dinamika ekonomi. Struktur rasio keserasian belanja menunjukkan dominasi belanja operasi (78–83%) dengan belanja modal yang rendah (7–15%), menandakan perlunya keseimbangan agar alokasi belanja lebih mendukung pembangunan. Sementara itu, rasio efisiensi belanja tergolong baik di atas 90%, bahkan mencapai 102,90% pada tahun 2024, yang perlu dianalisis untuk memastikan realisasi belanja tetap terkendali. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Buleleng menjadi objek yang relevan untuk dianalisis karena mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah pascapandemi serta memberikan gambaran empiris dan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja belanja di masa mendatang.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada fokus, ruang lingkup, serta konteks waktu yang dianalisis. Penelitian ini secara khusus mengkaji kinerja belanja daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng selama periode 2020-2024 dengan menggunakan pendekatan rasio pertumbuhan, rasio keserasian, dan efisiensi belanja, serta menyoroti secara mendalam tentang struktur belanja dan ketepatan realisasi anggaran. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Monika Sales di Kabupaten Dairi menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan lima indikator rasio, yaitu efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, dan rasio kemandirian. Fokus Utama penelitiannya lebih menekankan pada peran Pendapatan Asli Daerah dan tingkat Kemandirian keuangan dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini

menilai bahwa efektivitas PAD belum optimal dan dominasi belanja rutin menghambat alokasi untuk pembangunan (Sales dkk., n.d.).

Sementara itu, Sri Wahyuni Febriyanty Gea melakukan analisis serupa di kota Gunungsitoli. Penelitiannya juga menilai kinerja keuangan daerah berdasarkan lima rasio utama. Namun, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio efisiensi cenderung tidak efisien (melebihi 100%), dan efektivitas keuangan masih rendah. Penelitian ini juga menyebut bahwa belanja modal mendominasi dibanding belanja operasi yang menunjukkan kontras dengan banyak daerah lain (Gea, 2022).

Dari kedua penelitian tersebut adapun keunggulan pada penelitian ini yang dimana terletak pada fokus evaluasi yang lebih terarah pada struktur belanja daerah, bukan hanya kinerja keuangan secara umum. Penelitian ini tidak membahas PAD atau rasio kemandirian, namun menitikberatkan pada bagaimana alokasi anggaran belanja digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik, termasuk bagaimana belanja modal semakin menurun dan belanja operasional terus mendominasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai Belanja Daerah Kabupaten Buleleng dengan judul penelitian, **“Analisis Rasio Pertumbuhan dan Keserasian Serta Efisiensi Belanja Untuk Menilai Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka timbul permasalahan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Adanya fluktuasi pada pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Buleleng selama periode 2020–2024, di mana pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan sebesar -22,91% akibat pandemi COVID-19, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika dalam kebijakan belanja yang perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas dan pertumbuhan fiskal.

2. Dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal menunjukkan struktur belanja yang belum seimbang. Proporsi belanja operasional yang terus meningkat (sekitar 78–83%) dan rendahnya belanja modal (hanya berkisar 7–15%) mengindikasikan bahwa alokasi anggaran lebih banyak diarahkan pada kegiatan rutin pemerintahan dibandingkan investasi pembangunan jangka panjang.
3. Efisiensi belanja daerah yang berfluktuasi dan mencapai nilai di atas 100% pada tahun 2024 menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengendalian realisasi anggaran. Meskipun efisiensi di atas 90% umumnya menunjukkan kinerja yang baik, efisiensi yang melebihi 100% dapat mengindikasikan adanya kelebihan realisasi terhadap anggaran yang perlu dianalisis penyebab dan dampaknya terhadap kinerja keuangan daerah.
4. Keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal belum optimal, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Ketidakeimbangan ini dapat menyebabkan keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja belanja daerah secara menyeluruh untuk mengetahui apakah peningkatan realisasi belanja setiap tahun benar-benar sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjaga penelitian ini agar tetap fokus dan terarah, serta tidak melebar, maka penelitian ini memiliki batasan. Penelitian ini hanya menganalisis kinerja belanja daerah Kabupaten Buleleng pada tahun anggaran 2020 hingga 2024, berdasarkan data Anggaran dan Realisasi APBD yang diperoleh dari laporan resmi pemerintah daerah. Analisis yang digunakan hanya menggunakan tiga jenis rasio, yaitu rasio pertumbuhan belanja, rasio keserasian belanja, serta rasio efisiensi belanja daerah.

Rasio efisiensi belanja dihitung dengan menggunakan total realisasi

pendapatan daerah, bukan hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar mencerminkan keseluruhan kapasitas fiskal daerah. Sedangkan untuk rasio keserasian belanja difokuskan pada perbandingan antara belanja operasi dan belanja modal, serta belanja pegawai dan belanja non-pegawai.

Penelitian ini tidak menganalisis belanja secara sektoral atau per SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), melainkan berfokus pada klasifikasi belanja secara umum sesuai dengan laporan APBD pemerintah daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, serta dokumen keuangan resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2020-2024?
2. Bagaimana kinerja Belanja Daerah kabupaten Buleleng tahun 2020-2024?
3. Apa saja faktor yang menyebabkan penurunan dan peningkatan dalam perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng?
4. Apa saja faktor yang memengaruhi penurunan dan peningkatan kinerja Belanja Daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2020?
5. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengatasi penurunan kinerja Belanja Daerah?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2020-2024.
2. Untuk menganalisis bagaimana kinerja Belanja Daerah kabupaten Buleleng tahun 2020-2024.

3. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penurunan dan peningkatan dalam perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi penurunan dan peningkatan kinerja Belanja Daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2020.
5. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengatasi penurunan kinerja Belanja Daerah.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menjadi bahan evaluasi wawasan bagi pengembangan ilmu akuntansi yang berkaitan dengan penilaian kinerja belanja daerah dilihat dari sisi rasio keuangan yang digunakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman langsung kepada penulis dalam melakukan analisis terhadap data keuangan daerah, khususnya melalui pendekatan rasio pertumbuhan, keserasian, dan efisiensi belanja daerah. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan kemampuan penulis dalam berpikir kritis dan analitis terhadap isu-isu pengelolaan keuangan publik, serta mengasah keterampilan dalam menyusun karya ilmiah yang sistematis dan bermanfaat bagi pengambilan kebijakan publik.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menilai dan meningkatkan kinerja belanja daerah. Dengan memahami rasio pertumbuhan, keserasian, dan efisiensi belanja, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam alokasi maupun pelaksanaan anggaran, serta menyusun kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun dosen dalam kegiatan akademik, seperti penyusunan tugas akhir, penelitian lanjutan, atau pengembangan kurikulum yang relevan dengan isu- isu aktual di bidang pengelolaan keuangan daerah.

